

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOMISI IV DPR RI**

**BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
PERUM BULOG, DAN DEWAN KELAUTAN INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Sidang	: III
Rapat Ke	: 32
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat	: Terbuka
Dengan	: Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Hari/Tanggal	: Senin, 24 Mei 2010
Pukul	: 19.00 – 23.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara	: - Penilaian kinerja IUPHHKA-HA, HPH, dan Restorasi; - Kondisi dunia kehutanan; - Penjelasan tata niaga kayu hutan rakyat dan kondisi industri kayu UKM termasuk rotan; - Perkembangan berbagai usulan daerah untuk perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP termasuk usulan Provinsi Kalimantan Tengah; - Perkembangan terakhir masalah kawasan hutan pasca pengesahan RTRWP Kalimantan Selatan; - Program-program Pemerintah aplikasi dari hasil Balitbang untuk industri untuk industri kecil menengah hasil hutan kayu dan non kayu; dan - Kajian Balitbang tentang diameter optimum yang ideal sebagai dasar penentuan potensi tebangan kayu di hutan jati dan hutan rimba.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., MH.
Sekretaris	: Aris Subiakto
Hadir Anggota	: 31 dari 49 Anggota Komisi IV DPR RI
Hadir Pasangan Kerja	: Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan beserta jajarannya

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka pukul 19.00 WIB oleh Ketua Rapat Bapak Firman Soebagyo, SE., MH. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menolak rencana kebijakan ekspor log hasil hutan alam dan meminta Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan untuk mengkaji rencana pemerintah untuk ekspor kayu log hutan tanaman rakyat.
2. Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan tidak memperpanjang dan mencabut ijin konsesi HPH/HTI yang berkinerja buruk untuk kemudian dibuat rencana pengelolaannya agar kawasan hutan tersebut menjadi lebih produktif dengan melibatkan masyarakat.
3. Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan agar di kawasan kubah gambut di Semenanjung Kampar, Riau dijadikan areal restorasi ekosistem dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk KPH dengan melibatkan peran serta masyarakat.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan agar menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.00 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Segera memproses berbagai usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam usulan revisi RTRWP dari berbagai daerah, sehingga tidak menghambat percepatan pembangunan;
 - b. Menyampaikan hasil kajian tim terpadu dan peta perubahan peruntukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - c. Segera merealisasikan tata batas dan pemantapan kawasan hutan untuk Taman Nasional Teso Nilo.
2. Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyelesaikan berbagai persoalan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan, terutama yang menyangkut hak adat dan kepentingan masyarakat berkaitan dengan TNGHS melalui kajian perubahan fungsi kawasan hutan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyelesaikan masalah perizinan pinjam pakai kawasan hutan oleh PT. Freeport dan perusahaan-perusahaan tambang lainnya dan perkembangannya dapat dilaporkan pada Rapat Dengar Pendapat berikutnya.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan agar menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.00 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mengapresiasi berbagai hasil penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, untuk itu hasil-hasil penelitian tentang hasil hutan non kayu dan berbagai hasil peralatan industri bagi usaha kecil menengah bidang kehutanan agar dioptimalkan, untuk kemudian dimasukkan dalam program kegiatan bantuan sosial untuk masyarakat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2011.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan RI agar mengupayakan Program CSR atau Program *Community Development* yang dilaksanakan BUMN/Swasta sektor kehutanan dapat mengadopsi dan mengaplikasikan secara lebih luas di masyarakat dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian Balitbang Kehutanan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kehutanan agar memenuhi kebutuhan Balitbang serta memberikan *insentif* atau *reward* terhadap para peneliti yang menghasilkan temuan-temuan yang strategis dan agar ditindaklanjuti dalam program-program prioritas yang bermanfaat bagi rakyat.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan agar menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 23.00 WIB.

KOMISI IV DPR RI
KETUA RAPAT,

FIRMAN SOEBAGYO, SE., MH.

